

RANGKUMAN

SEMINAR NASIONAL MENUJU UNDANG-UNDANG INOVASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN KEMANDIRIAN NASIONAL

MAKASSAR - RABU, 9 AGUSTUS 2017

1. Inovasi menjadi kunci penyelesaian masalah dalam mencapai kemandirian dan kemakmuran bangsa.
2. Inovasi mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi, basis produksi dan pemanfaatannya/difusinya di masyarakat.
3. Inovasi memerlukan SDM kreatif menuju kearah *knowledge based economy*.
4. Untuk mewujudkan inovasi, Perguruan Tinggi perlu mengarahkan dirinya menjadi *entrepreneurial university*.
5. Kerjasama antar ABGC (*Academician, Business, Government and Community*) menjadi prasyarat dalam meningkatkan daya saing.
6. Dalam mengembangkan sistem inovasi diperlukan peningkatan akses terhadap akses pasar dan akses keuangan
7. Perlu disusun skenario atau *road map* pengembangan inovasi sesuai dengan prioritas yang ditetapkan secara nasional
8. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi diperlukan pembentukan konsorsium dalam pelaksanaan pengembangan produk prioritas dalam kerangka sistem inovasi;
9. Inovasi harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah, kualitas produk yang tinggi dan berbasis pada potensi lokal;

10. Pengalaman dalam melaksanakan Konsorsium Smart Card dapat dijadikan pelajaran berharga dalam penyusunan UU Inovasi;
11. BUMN dapat berperan sebagai penghela bagi pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional;
12. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan penguatan kelembagaan iptek / riset daerah.
13. Keberadaan Science Techno Park di berbagai daerah menjadi intermediari dalam membangun sistem inovasi daerah.
14. Diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dan Kelembagaan untuk menjamin terciptanya sistem inovasi nasional;
15. Inovasi dimulai dari yang hal yang kecil dan berasal dari daerah, Nasional dan Internasional;
16. Diperlukan inovasi di bidang kebijakan publik dan inovasi sosial budaya untuk mendukung keberhasilan sistem inovasi nasional;
17. Hasil Rapat Team Ad hoc DRN pada tanggal 10 Juli 2017, yang telah disampaikan pada rapat Pleno I Sidang Paripurna, diadopsi menjadi hasil sidang Paripurna.